

## Analisis Strategi Pengawasan Pengelolaan Obat Oleh Balai POM Bogor

Aeni Kusno<sup>1</sup>, Embriana Dinar Pramestyani<sup>2</sup>, Salma Hilmy Rusydi Hashim<sup>3</sup>,  
Ulyati Ulfah<sup>4</sup>, Defita Roza<sup>5</sup>, Ester Junita Sinaga<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Medika Suherman

<sup>5,6</sup> Balai POM Bogor

Email Penulis Korespondensi: [ainikusno881@gmail.com](mailto:ainikusno881@gmail.com)

### Abstrak

Pengawasan pengelolaan obat merupakan upaya krusial untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Balai POM Bogor memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan di wilayah Kota/Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang memiliki tantangan distribusi obat yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan pengelolaan obat yang diterapkan oleh Balai POM Bogor dengan pendekatan analisis SWOT. Metode yang digunakan yaitu observasi/wawancara dilanjutkan dengan pemetaan strategi prioritas melalui Matriks Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai POM Bogor berada pada kuadran III (turn-around strategy), yang mencerminkan tingginya peluang eksternal namun masih dihadapkan pada kelemahan internal yang signifikan. Kesimpulan penelitian ini adalah Balai POM Bogor memiliki kekuatan (Kewenangan hukum, kolaborasi lintas sektor, dukungan sistem informasi), Kelemahan (Keterbatasan dana operasional dan kurangnya fasilitas), Peluang (Edukasi publik melalui media sosial, program Ayo Buang Sampah Obat (ABSO)), dan Ancaman (Adanya potensi gratifikasi kepada aparat penegak hukum). Dari Matriks QSPM, lima strategi prioritas yang direkomendasikan adalah: (1) pengajuan dukungan dana tambahan untuk pembangunan gedung dan laboratorium, (2) pemanfaatan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital, (3) pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan program ABSO, (4) penyusunan edukasi berbasis komunitas, serta (5) pemanfaatan UU BPOM untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan.

Kata kunci: Balai POM Bogor, Pengawasan Obat, QSPM, Strategi, SWOT

### Abstract

*Drug management supervision is a crucial effort to ensure the quality, safety, and efficacy of medicines circulating in society. The Bogor Food and Drug Authority (Balai POM Bogor) holds a strategic role in carrying out supervision in Bogor City/Regency and Depok City, which face complex challenges in drug distribution. This study aims to analyze the drug management supervision strategies implemented by Balai POM Bogor using a SWOT analysis approach. The methods employed were observation and interviews, followed by mapping priority strategies through the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The results show that Balai POM Bogor is positioned in quadrant III (turn-around strategy), which indicates high external opportunities but significant internal weaknesses. The study concludes that Balai POM Bogor has strengths (legal authority, cross-sector collaboration, and information system support), weaknesses (limited operational funds and inadequate facilities), opportunities (public education through social media and the "Ayo Buang Sampah Obat"/ABSO program), and threats (potential gratification to law enforcement officers). Based on the QSPM, five priority strategies are recommended: (1) proposing additional funding for the construction of office buildings and laboratories, (2) utilizing cross-sector collaboration and digital technology, (3) engaging the community in supervision and the ABSO program, (4) developing community-based education, and (5) optimizing the BPOM Law to strengthen supervisory infrastructure and facilities.*

Keywords: Balai POM Bogor, QSPM, Supervision Drug, Strategy, SWOT

## 1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang secara langsung memengaruhi produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai hak asasi manusia, kesehatan tidak hanya mencerminkan kondisi bebas dari penyakit, melainkan juga keterpenuhan aspek fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan, peran obat sangat penting, karena berfungsi sebagai bagian dari intervensi medis dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit [1].

Obat sendiri diartikan sebagai Zat yang memiliki kemampuan mengubah proses biologis dan zat kimia yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, mendiagnosis, atau memicu kondisi tertentu. Obat juga digunakan dalam mengobati penyakit, mengurangi gejala, atau mengubah proses kimia tubuh [2]. Oleh karena itu, obat memegang peranan yang sangat krusial dalam layanan kesehatan karena penanganan serta pencegahan berbagai penyakit tidak bisa dipisahkan dari usaha tindakan terapi medis [3]. Namun demikian, dalam peredarannya di masyarakat, obat memerlukan pengawasan ketat terhadap mutu, keamanan, dan efektivitasnya, karena aspek-aspek ini berperan penting dalam menjamin kualitas dan keselamatan penggunaannya.

Salah satu cara utama untuk menjamin keamanan obat adalah melalui pengelolaan obat yang baik dan terintegrasi. Menurut Safanny Putri *et al.* [4], Pengelolaan obat meliputi serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, hingga pelaporan obat. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyalahgunaan serta peredaran obat yang tidak sesuai aturan. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang terjadi di Kota Depok, di mana Polres Metro Depok mengamankan sebanyak 27 orang penjual obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar selama periode Januari hingga April 2025 [5]. Obat daftar G termasuk jenis obat keras yang penggunaannya harus melalui resep dokter karena memiliki potensi efek samping dan risiko penyalahgunaan yang tinggi. Peredaran obat tanpa izin seperti ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas.

Kasus ini menegaskan pentingnya manajemen obat yang tidak hanya terpaku pada aspek administratif, tetapi juga harus mencakup pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi dan penggunaan obat. Ketidaktertibn dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan dapat membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengedarkan obat-obatan secara ilegal, termasuk obat keras yang seharusnya hanya dapat diperoleh melalui pengawasan tenaga medis profesional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat yang tidak optimal dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi individu maupun bagi sistem kesehatan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan dalam memastikan bahwa semua produk farmasi yang digunakan telah melalui prosedur penilaian yang ketat dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan [6].

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, BPOM membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), serta Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) [7]. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai POM di Bogor memiliki tugas strategis dalam memastikan keamanan obat dan makanan di wilayah kerjanya, yang mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Luas wilayah pengawasan mencapai 2.982,6 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk hampir 9,7 juta jiwa, membuat tantangan pengawasan semakin berat dan membutuhkan strategi yang efektif.

Untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan, Badan POM telah menyusun Rencana Strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang merupakan bagian keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 menjadi pedoman dan acuan bagi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, taktik, target kinerja, dan pendanaan BPOM periode 2021–2024 telah tertuang dalam Renstra tersebut [8].

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, Balai POM Bogor telah melakukan adaptasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengawasannya, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Balai POM Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, pengawasan obat dan makanan akan menghadapi sejumlah permasalahan, baik yang terkait dengan teknologi, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mengamanatkan Balai POM Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan sebelum diedarkan dan setelah diedarkan agar memenuhi standar mutu, keamanan, serta khasiat/manfaat [8].

Untuk memahami secara menyeluruh terkait strategi pengawasan pengelolaan obat yang diterapkan oleh Balai POM Bogor, diperlukan analisis SWOT sebagai alat bantu identifikasi kondisi internal dan eksternal lembaga. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu proses yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi keselarasan strategis antara peluang eksternal dan kondisi internalnya dengan mengevaluasi berbagai ancaman di lingkungan eksternal beserta kelemahan internal organisasi [9]. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap strategi pengawasan pengelolaan obat yang diterapkan oleh Balai POM Bogor, guna mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan pengelolaan obat yang dilaksanakan oleh Balai POM Bogor dalam upaya menjamin mutu dan keamanan obat secara optimal di wilayah kerjanya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan kuantitatif, di mana metode kualitatif dipakai untuk menggali pemahaman mendalam terkait strategi pengawasan pengelolaan obat melalui wawancara terstruktur, sementara metode kuantitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka guna memperkuat objektivitas hasil. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Balai POM Bogor yang berjumlah 54 orang, dengan sampel dipilih menggunakan teknik kuota sampling dari tiga divisi utama yang terlibat langsung dalam pengawasan obat, yaitu Divisi Pemeriksaan, Divisi Penindakan, dan Divisi Sampling, masing-masing diwakili oleh ketua divisinya. Penentuan sampel mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi agar data yang diperoleh relevan dan berkualitas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi yang bersumber dari Rencana Strategis Balai POM Bogor Tahun 2021–2024, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dilanjutkan dengan penyusunan matriks QSPM untuk menentukan prioritas strategi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*)

Matriks IFE merupakan sebuah alat dalam merumuskan strategi yang berfungsi untuk menilai aspek kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga [10]. Alat ini secara khusus berfokus pada dua komponen utama, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi dalam menjalankan fungsinya. Melalui proses penilaian yang sistematis terhadap masing-masing faktor, Matriks IFE membantu dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi internal organisasi serta menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas operasional. Hasil identifikasi faktor internal tersebut disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Matriks IFE

Elemen	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>			
Sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman.	0,13	2	0,3
Memiliki kewenangan yang kuat berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku.	0,17	5	0,9
Kerja sama lintas sektor mendukung akurasi data dan efektivitas pengawasan.	0,17	3	0,5
SIPT dan <i>e-WAS</i> menjadi dasar analisis dan penindakan dalam pengawasan.	0,22	4	0,9
Edukasi dan informasi membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya obat yang aman.	0,09	1	0,1
Pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan dukungan teknologi.	0,11	3	0,3
Didukung pemerintah pusat dan menjalin komitmen dengan pemerintah daerah.	0,11	2	0,2
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>3,15</b>
Elemen	Bobot	Rating	Skor
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>			
Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas.	0,14	3	0,43
Keterbatasan dana operasional menghambat optimalisasi pengawasan.	0,14	5	0,71
Belum tersedia fasilitas bangunan khusus untuk mendukung operasional sepenuhnya.	0,14	4	0,57
Cakupan wilayah kerja yang luas menyulitkan jangkauan pengawasan secara menyeluruh.	0,10	1	0,10

Elemen	Bobot	Rating	Skor
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>			
Keragaman tipe masyarakat menyulitkan komunikasi efektif antara petugas dan masyarakat.	0,12	3	0,36
Fasilitas laboratorium saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pengujian secara optimal.	0,17	4	0,67
Keterbatasan dalam mengantisipasi berbagai modus ilegal yang terus berkembang	0,19	3	0,57
<b>Total</b>	1		3,40
<b>Selisih IFE = Kekuatan - Kelemahan</b>		-0,25 (Sumbu x)	

### 3.2. Matriks EFE (*External Factor Evaluation*)

Matriks EFE ialah suatu alat dalam proses perumusan strategi yang berfungsi untuk menilai berbagai peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan suatu organisasi atau lembaga [10]. Matriks ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, kondisi pasar, maupun dinamika sosial dan politik. Melalui Matriks EFE, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor eksternal yang signifikan, sehingga dapat merancang strategi adaptif yang lebih responsif terhadap kondisi lingkungan. Hasil identifikasi faktor internal tersebut disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Matriks EFE

Elemen	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>			
Telah tersedia lahan untuk pembangunan gedung kantor baru.	0,08	3	0,24
Perluasan kerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian maupun <i>e-commerce</i> (IDEA dan Tim Siber).	0,12	3	0,37
Teknologi mendorong penguatan pengawasan melalui digitalisasi	0,12	2	0,24
Akses informasi dan edukasi yang mudah meningkatkan kesadaran Masyarakat.	0,16	3	0,49
Program ABSO jadi peluang pengelolaan obat rusak agar tak disalahgunakan.	0,22	4	0,90
UU BPOM memperkuat landasan hukum dan kewenangan pengawasan BPOM	0,24	5	1,22
Peluang peningkatan kinerja lewat pembangunan laboratorium yang modern.	0,04	1	0,04
<b>Total</b>	1		3,51

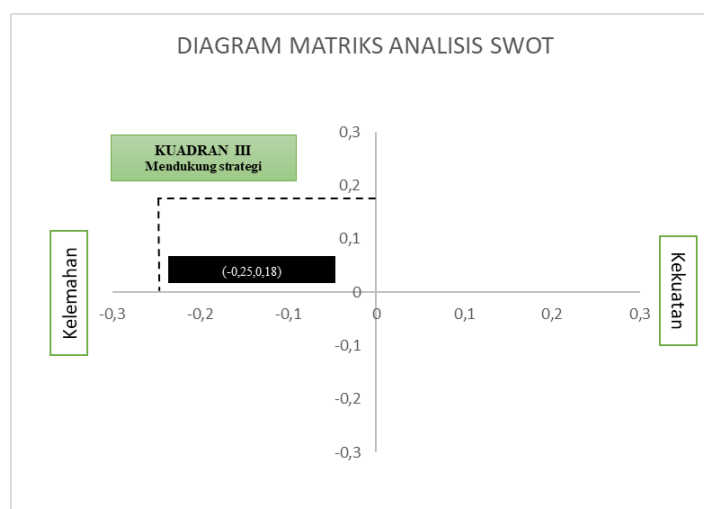
Elemen	Bobot	Rating	Skor
<b>Ancaman (Threats)</b>			
Globalisasi mempermudah peredaran produk tak terkontrol, termasuk lewat jalur digital.	0,08	1	0,08
Banyak pelaku usaha belum sadar pentingnya distribusi dan pengelolaan obat sesuai aturan.	0,12	4	0,49
Masih ada permintaan obat terlarang dan oknum yang menyalahgunakan obat rusak demi keuntungan pribadi.	0,16	5	0,82
Banyaknya produk obat baru yang dijual secara online.	0,04	3	0,12
Masih terdapat potensi suap atau gratifikasi kepada aparat penegak hukum.	0,22	4	0,90
Modus penambahan bahan berbahaya kian beragam.	0,18	2	0,37
Pelaku usaha terus mencari cara baru edarkan produk ilegal.	0,18	3	0,55
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>3,33</b>
<b>Selisih EFE = Peluang - Ancaman</b>			<b>0,18 (Sumbu y)</b>

### 3.3. Diagram Matriks Analisis SWOT

Setelah dilakukan analisis SWOT, langkah berikutnya adalah menyusun diagram matriks SWOT dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nilai Faktor Internal = Kekuatan – Kelemahan  
 = 3,15 – 3,40  
 = (-0,25) (**Sumbu X**)
2. Nilai Faktor Eksternal = Peluang – Ancaman  
 = 3,51 – 3,33  
 = 0,18 (**Sumbu Y**)

Dari hasil perhitungan tersebut maka di dapatkan posisi koordinat pengawasan pengelolaan obat oleh Balai POM Bogor pada titik koordinat (-0,25 ; 0,18) dengan gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Matriks Analisis SWOT Pengawasan Pengelolaan Obat Oleh Balai POM Bogor

Berdasarkan Diagram Matriks Analisis SWOT diatas, dihasilkan (-0,25 ; 0,18) Dimana titik ini berada di kuadran III (*turn-around strategy*), Kuadran ini menunjukkan bahwa organisasi berada dalam kondisi internal yang lemah namun memiliki peluang eksternal yang menjanjikan, sehingga strategi yang tepat adalah menjaga stabilitas dengan memperbaiki kelemahan internal sambil tetap memanfaatkan peluang yang ada. Baliuskas [11] menjelaskan bahwa strategi *Turn –around* merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan manajemen organisasi untuk memperbaiki kinerja serta memulihkan tingkat profitabilitas. Strategi ini bertujuan mengubah kondisi organisasi yang kurang menguntungkan menjadi lebih baik.

### 3.4. Matriks QSPM (*Quantitative Strategic Planing Matrix*)

Tabel 3 Matriks QSPM

IFAS  EFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESSES (W)
<b>OPPORTUNITIES (O)</b> 1. Telah tersedia lahan untuk pembangunan gedung kantor baru 2. Perluasan kerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian maupun e-commerce (IDEA dan Tim Siber) 3. Teknologi mendorong penguatan pengawasan melalui digitalisasi 4. Kemudahan akses informasi dan edukasi mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman dan berkualitas 5. Program Ayo Buang Sampah Obat (ABSOS) yang sedang digalakkan dan melibatkan pemerintah daerah, menjadi peluang untuk memastikan obat-obat rusak atau kedaluwarsa ditangani dengan benar dan tidak disalahgunakan. 6. Disahkannya Undang-Undang BPOM memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk memperkuat kewenangan dan kemandirian BPOM dalam melakukan pengawasan 7. Adanya peluang untuk meningkatkan kinerja melalui pembangunan laboratorium yang lebih lengkap dan modern	<b>Strategi S – O</b> 1. Mengoptimalkan SDM yang kompeten untuk memperluas kerja sama lintas sektor dengan instansi lain (Kepolisian, Kementan, e-commerce). 2. Memperkuat edukasi masyarakat dengan dukungan teknologi dan akses informasi yang luas.	<b>Strategi W - O</b> 1. Mengajukan dukungan pendanaan tambahan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan gedung dan laboratorium baru. 2. Memanfaatkan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital untuk menutupi keterbatasan SDM dan menjangkau wilayah luas 3. Melibatkan masyarakat dalam pelaporan distribusi obat dan ABSO guna mengatasi kendala komunikasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan. 4. Menyusun program edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi keberagaman tipe masyarakat. 5. Mendorong pemanfaatan UU BPOM sebagai landasan hukum untuk meminta penguatan sarana dan prasarana pengawasan.
<b>THREATS (T)</b> 1. Globalisasi mempermudah peredaran produk yang tidak terkontrol, termasuk melalui jalur digital. 2. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya distribusi dan pengelolaan obat yang sesuai aturan. 3. Masih terdapat permintaan terhadap obat-obat terlarang dan adanya oknum yang memanfaatkan obat kedaluwarsa atau rusak demi keuntungan pribadi. 4. Banyaknya produk obat baru yang dijual secara online 5. Masih adanya potensi penyalahgunaan atau gratifikasi kepada aparat penegak hukum. 6. Modus penambahan bahan berbahaya dalam produk semakin bervariasi. 7. Pelaku usaha selalu mencari cara baru untuk mengedarkan produk ilegal.	<b>Strategi S – T</b> 1. Mengedukasi masyarakat secara masif untuk mengurangi permintaan terhadap obat-obat terlarang dan rusak. 2. Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku distribusi ilegal.	<b>Strategi W – T</b> 1. Mengembangkan sistem pengawasan digital yang efisien untuk mengatasi keterbatasan SDM dan luasnya cakupan wilayah.

Setelah ditetapkan bahwa posisi Balai POM Bogor berada dalam Kuadran III, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dan mengevaluasi alternatif strategi yang sesuai menggunakan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM), guna menentukan prioritas strategi yang paling tepat diterapkan. Analisis ini akan diaplikasikan dalam konteks pengawasan pengelolaan obat. Setiap alternatif strategi kemudian dinilai menggunakan *Attractiveness Scores* (AS), yaitu skor yang menunjukkan sejauh mana strategi tersebut dianggap menarik dalam menjawab isu strategis tertentu. Skor ini diberikan dalam rentang 1 sampai 4, di mana angka 1 menunjukkan strategi yang kurang menarik, dan angka 4 menunjukkan strategi yang sangat menarik.

Nilai total atau *Total Attractiveness Score* (TAS) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan nilai AS. Strategi dengan skor TAS tertinggi dianggap sebagai strategi prioritas karena memiliki daya tarik paling besar dan paling sesuai untuk diterapkan dalam konteks organisasi [12].

Dengan menggunakan Matriks QSPM, berbagai alternatif strategi yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT dievaluasi untuk menentukan strategi prioritas yang paling layak diimplementasikan. Fokus utama dalam kuadran III adalah strategi *turn-around*, yang menekankan pada pemanfaatan peluang eksternal untuk memperbaiki kelemahan internal organisasi. Dalam konteks ini, strategi W–O (*Weaknesses–Opportunities*) menjadi sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurut Qanita [12] strategi *Weaknesses-*

*Opportunities* (WO) adalah pendekatan yang digunakan untuk meminimalkan atau mengatasi kelemahan yang dimiliki suatu organisasi dengan cara memanfaatkan peluang yang ada.

Adapun alternatif strategi yang telah dirumuskan dan akan dievaluasi menggunakan QSPM adalah sebagai berikut:

- 1) Alternatif strategi 1 : Mengajukan dukungan pendanaan tambahan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan gedung dan laboratorium baru.
- 2) Alternatif strategi 2 : Memanfaatkan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital untuk menutupi keterbatasan SDM dan menjangkau wilayah luas.
- 3) Alternatif strategi 3 : Melibatkan masyarakat dalam pelaporan distribusi obat dan ABSO guna mengatasi kendala komunikasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
- 4) Alternatif strategi 4 : Menyusun program edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi keberagaman tipe masyarakat
- 5) Alternatif strategi 5 : Mendorong pemanfaatan UU BPOM sebagai landasan hukum untuk meminta penguatan sarana dan prasarana pengawasan.
- 6) Alternatif strategi 6 : Mengoptimalkan SDM yang kompeten untuk memperluas kerja sama lintas sektor dengan instansi lain (Kepolisian, Kementan, *e-commerce*).
- 7) Alternatif strategi 7 : Memperkuat edukasi masyarakat dengan dukungan teknologi dan akses informasi yang luas.
- 8) Alternatif strategi 8 : Mengedukasi masyarakat secara masif untuk mengurangi permintaan terhadap obat terlarang dan rusak.
- 9) Alternatif strategi 9 : Mengembangkan sistem pengawasan digital yang efisien untuk mengatasi keterbatasan SDM dan luasnya cakupan wilayah.
- 10) Alternatif strategi 10 : Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku distribusi ilegal.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Matriks QSPM

No	Alternatif Strategi	Total Skor
1	Alternatif Strategi 1 : Mengajukan dukungan pendanaan tambahan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan gedung dan laboratorium baru.	10,61
2	Alternatif Strategi 2 : Memanfaatkan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital untuk menutupi keterbatasan SDM dan menjangkau wilayah luas.	10,43
3	Alternatif Strategi 3 : Melibatkan masyarakat dalam pelaporan distribusi obat dan ABSO guna mengatasi kendala komunikasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan.	10,29
4	Alternatif Strategi 4 : Menyusun program edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi keberagaman tipe masyarakat	9,82
5	Alternatif Strategi 5 : Mendorong pemanfaatan UU BPOM sebagai landasan hukum untuk meminta penguatan sarana dan prasarana pengawasan.	9,96
6	Alternatif Strategi 6 : Mengoptimalkan SDM yang kompeten untuk memperluas kerja sama lintas sektor dengan instansi lain (Kepolisian, Kementan, <i>e-commerce</i> ).	9,65

No	Alternatif Strategi	Total Skor
7	Alternatif Strategi 7 : Memperkuat edukasi masyarakat dengan dukungan teknologi dan akses informasi yang luas.	9,46
8	Alternatif Strategi 8 : Mengedukasi masyarakat secara masif untuk mengurangi permintaan terhadap obat terlarang dan rusak.	9,69
9	Alternatif Strategi 9 : Mengembangkan sistem pengawasan digital yang efisien untuk mengatasi keterbatasan SDM dan luasnya cakupan wilayah.	9,62
10	Alternatif Strategi 10 : Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku distribusi ilegal.	9,22

Hasil Perhitungan menghasilkan lima alternatif strategi W–O yang dinilai paling sesuai dengan kondisi Balai POM Bogor, yaitu:

- 1) Mengajukan dukungan pendanaan tambahan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan gedung dan laboratorium baru.
- 2) Memanfaatkan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital untuk menutupi keterbatasan SDM dan menjangkau wilayah pengawasan yang luas.
- 3) Melibatkan masyarakat dalam pelaporan distribusi obat dan program ABSO untuk mengatasi kendala komunikasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
- 4) Menyusun program edukasi berbasis komunitas agar lebih efektif menjangkau tipe masyarakat yang beragam.
- 5) Mendorong pemanfaatan UU BPOM sebagai landasan hukum untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan.

## Pembahasan

Pengawasan pengelolaan obat merupakan aspek krusial dalam melindungi kesehatan masyarakat, karena obat yang beredar di pasaran berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan keselamatan konsumen. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Balai POM Bogor memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh tahapan peredaran obat—mulai dari produksi, distribusi, hingga penyaluran di fasilitas pelayanan kefarmasian—berjalan sesuai ketentuan serta memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pengawasan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan berbasis risiko, mencakup seluruh rantai distribusi, dengan fokus pada sarana berisiko tinggi seperti apotek dan puskesmas yang menjual obat keras, guna mencegah penyalahgunaan maupun peredaran obat ilegal. Proses ini mempertimbangkan riwayat pemeriksaan, hasil temuan produk, serta pola distribusi, dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Pelaksanaannya berlandaskan pada Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian yang mencakup seluruh siklus pengelolaan obat, mulai dari pengadaan hingga pelaporan.

Dalam penelitian ini, tiga responden dipilih dari kepala divisi yang berperan langsung dalam pengawasan, yaitu Divisi Pemeriksaan, Divisi Sampling, dan Divisi Penindakan. Divisi Pemeriksaan bertugas melakukan pengawasan sarana dan produk pada tahap *post-market*, dengan tindak lanjut berupa pembinaan, sanksi administratif (pelarangan edar, penarikan, pencabutan izin edar), penyitaan, hingga pemusnahan produk. Divisi Sampling bertanggung jawab atas inspeksi sarana serta pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium Balai

POM Kabupaten Bogor, termasuk pemeriksaan validitas NIE, masa kedaluwarsa, kondisi fisik, label, dan mutu. Sementara itu, Divisi Penindakan melaksanakan penegakan hukum melalui penyidikan atas pelanggaran peraturan perundangan di bidang obat dan makanan, berdasarkan hasil pengujian, pemeriksaan, maupun kegiatan intelijen, hingga tahap *projusticia* dengan sanksi pidana atau denda. Pemilihan responden ini dilakukan karena mereka memiliki otoritas, pengalaman, dan pemahaman strategis terkait pengawasan, sehingga mampu memberikan data yang representatif dan kredibel.

Penelitian bertujuan menganalisis strategi pengawasan pengelolaan obat Balai POM Bogor dengan metode SWOT, IFE, EFE, dan QSPM untuk menggambarkan posisi strategis organisasi sekaligus merumuskan strategi prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun, dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ditemukan bahwa Balai POM Bogor memiliki sejumlah modal strategis yang kuat, tetapi juga dihadapkan pada keterbatasan internal yang signifikan.

#### **a. Kekuatan (*Strengths*)**

Dalam aspek kekuatan internal, lembaga ini ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana yang dijelaskan oleh Aulia & Ali. [13], Sumber Daya Manusia adalah faktor strategis yang berperan penting dalam keberhasilan organisasi melalui kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan.

Selain itu, Balai POM Bogor memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui regulasi yang berlaku menjadi landasan sah bagi BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan, di mana kewenangan tersebut secara langsung diberikan melalui Undang-Undang [14]. Sementara itu, kerja sama lintas sektor juga turut mendukung akurasi data dan efektivitas pengawasan. Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan organisasi karena memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan tanggung jawab secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama [15].

Dukungan sistem informasi pengawasan seperti SIPT dan *e-WAS* yang menjadi landasan penting dalam proses pengawasan dan penindakan. Pemanfaatan *e-WAS* (*early warning system*) sendiri merupakan kekuatan strategis karena mampu mempercepat deteksi dini, respons penindakan, serta integrasi data dalam pengawasan [16]. Balai POM Bogor juga memiliki kekuatan dalam aspek edukasi publik, dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas [17].

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko serta didukung oleh pemanfaatan teknologi juga menjadi kekuatan penting. Menurut Hermin *et al.* [18], perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai strategi utama dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dukungan dari pemerintah pusat serta komitmen kerja sama dengan pemerintah daerah pun memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Shabihah *et al.* [19], keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada dukungan kebijakan dari berbagai tingkat pemerintahan, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengawasan di tingkat nasional maupun daerah.

#### **b. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi seperti keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia. Hasna. [20], menyatakan bahwa kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan lembaga. Selain itu, keterbatasan dana operasional juga menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan secara optimal.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rika Yohana Sari *et al.* [21], keterbatasan pendanaan merupakan kelemahan umum yang sering dihadapi oleh berbagai organisasi dan dapat menghambat keberlangsungan program kerja.

Selain itu, ketiadaan bangunan khusus untuk mendukung operasional secara menyeluruh serta keterbatasan fasilitas laboratorium yang tersedia saat ini masih menjadi kendala signifikan. Terbatasnya fasilitas fisik dan sarana operasional, seperti ruang kerja dan perlengkapan pendukung, dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan pengawasan [22]. Cakupan wilayah kerja yang luas turut menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh area pengawasan secara merata. Menurut Reza Syahputra. [23], wilayah kerja yang terlalu luas sering kali menyulitkan pengawasan secara menyeluruh dan konsisten.

Di sisi lain, keberagaman tipe masyarakat di wilayah pengawasan juga menyebabkan tantangan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara petugas dan masyarakat. Ismayanti Yahya *et al.* [24], menyatakan bahwa perbedaan pola komunikasi antar etnik memerlukan penyesuaian dalam bahasa, simbol budaya, dan gaya penyampaian pesan agar interaksi dapat berjalan efektif.

Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah keterbatasan dalam mengantisipasi berbagai modus ilegal yang terus berkembang juga menjadi kelemahan tersendiri. Menurut Kunjayanti. [25], modus baru dalam distribusi obat berbahaya sering kali sulit diantisipasi apabila pengawasan tidak dilakukan secara rutin atau tidak didukung oleh strategi yang adaptif serta kemampuan dalam mendeteksi pola-pola baru. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap peredaran produk ilegal yang semakin kompleks.

### **c. Peluang (*Opportunities*)**

Dari sisi eksternal, Balai POM Bogor memiliki berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor baru serta peluang untuk pengembangan laboratorium yang lebih lengkap dan modern. Selain itu, perluasan kerja sama lintas sektor dengan instansi lain seperti Kepolisian, *e-commerce* (IDEA dan Tim Siber), maupun pemerintah daerah juga membuka ruang sinergi yang lebih luas.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi peluang penting dalam mendorong digitalisasi pengawasan. Sejalan dengan itu, kemudahan akses terhadap informasi dan edukasi melalui media sosial seperti Instagram turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan obat yang aman dan berkualitas [17]. Peluang lain yang dapat dimaksimalkan adalah program Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) yang digalakkan bersama pemerintah daerah. Program ini diimplementasikan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan apoteker untuk memperkuat pengelolaan limbah obat dan mencegah penyalahgunaan [26].

Di sisi regulasi, disahkannya Undang-Undang BPOM memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam memperkuat kewenangan dan kemandirian lembaga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini menjadi peluang penting untuk memperkuat posisi BPOM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

### **d. Ancaman (*Threats*)**

Di tengah berbagai peluang tersebut, Balai POM Bogor juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal yang berpotensi menghambat efektivitas pengawasan. Salah satu ancaman utama adalah meningkatnya peredaran produk yang tidak terkontrol akibat globalisasi, khususnya melalui jalur digital. Wahyudi. [27], menyatakan bahwa perdagangan obat ilegal melalui platform *e-commerce* terus meningkat, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam

perlindungan konsumen dan menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar digital.

Ancaman lainnya datang dari rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya distribusi dan pengelolaan obat sesuai aturan. Prabowo & Supardal. [22], menekankan bahwa kurangnya pelatihan dan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha dapat menghambat efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, tingginya permintaan terhadap obat ilegal secara daring mendorong pelaku usaha tanpa izin edar untuk terus berinovasi dalam distribusi, termasuk menjual produk obat baru secara online dan memanfaatkan obat kedaluwarsa demi keuntungan pribadi. Kondisi ini menjadi ancaman serius dalam pengawasan terhadap produk ilegal [28].

Selanjutnya, potensi gratifikasi kepada aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Hasan Madani. [29], mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pelaporan dan sulitnya pembuktian relasi jabatan dengan gratifikasi yang diterima memperbesar potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, modus penambahan bahan berbahaya dalam produk yang semakin bervariasi turut memperberat tantangan pengawasan.

Hasil penelitian ini melengkapi studi Aristawidya & Zuhrotun.[30], di BBPOM Bandung yang menunjukkan pengawasan cukup efektif namun belum memenuhi target Renstra 2020–2024, dengan rekomendasi peningkatan SDM, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembinaan berkelanjutan. Penelitian ini juga menguatkan pendekatan strategi berbasis SWOT dan QSPM seperti yang digunakan Pramestyani. [31], pada layanan kesehatan digital *HonestDocs*, dengan prinsip pemanfaatan peluang eksternal, penguatan jaringan, inovasi teknologi, dan pengembangan SDM.

Strategi prioritas Balai POM Bogor yang dihasilkan antara lain peningkatan pendanaan untuk penguatan sarana dan laboratorium, kerja sama lintas sektor berbasis teknologi, pelibatan masyarakat, edukasi komunitas, serta pemanfaatan regulasi UU BPOM. Strategi tersebut selaras dengan arah kebijakan Renstra Balai POM 2020–2024 yang menekankan optimalisasi sumber daya, penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi publik. Dengan demikian, strategi yang direkomendasikan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mendukung pencapaian target kinerja dan program strategis Balai POM Bogor sesuai arah kebijakan resmi lembaga.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Balai POM Bogor memiliki kekuatan berupa SDM kompeten, kewenangan hukum yang jelas, dukungan sistem informasi, serta kolaborasi lintas sektor, namun masih menghadapi kelemahan seperti keterbatasan SDM, dana, dan fasilitas fisik. Peluang strategis yang tersedia meliputi pembangunan fasilitas baru, kerja sama lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, edukasi publik, serta dukungan regulasi, sementara ancaman utama adalah maraknya peredaran obat ilegal, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan beragam modus distribusi obat tanpa izin. Hasil analisis SWOT menempatkan Balai POM Bogor pada kuadran III (*turn-around strategy*) dengan strategi *W–O (Weaknesses – Opportunities)* sebagai pendekatan terbaik. Dari Matriks QSPM, lima strategi prioritas yang direkomendasikan adalah: (1) pengajuan dukungan dana tambahan untuk pembangunan gedung dan laboratorium, (2) pemanfaatan kerja sama lintas sektor dan teknologi digital, (3) pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan program ABSO, (4) penyusunan edukasi berbasis komunitas, serta (5) pemanfaatan UU BPOM untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Maria Teresa Wensen, Sari Mandiana, and Agustin Widjiastuti, "Peredaran Obat Terlarang Di IndonesiVANCa dan Upaya Pencegahannya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 175–181, 2024, doi: 10.62383/aliansi.v1i2.99.
- [2] W. L. Prabowo, "Teori Tentang Pengetahuan Pereseapan Obat," *J. Med. hutama*, vol. 02, no. 04, pp. 402–406, 2021.
- [3] Marisca Evalina Gondokesumo and Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)," *Perspekt. Huk.*, pp. 91–107, 2021, doi: 10.30649/ph.v2i12.16.
- [4] Safanny Putri, Huwaydi Azzam Yusuf, Khansa Adristi, Adjrina Dawina Putri, and Novita Dwi Istanti, "Pemberian Obat Kedaluwarsa Kepada Pasien Ditinjau Dari Kebijakan Kesehatan Di Indonesia," *J. Sains dan Kesehat.*, vol. 6, no. 2, pp. 01–12, 2022, doi: 10.57214/jusika.v6i2.149.
- [5] Berita Depok, "Polres Metro Depok Amankan 27 Penjual Obat Daftar G Tanpa Izin Edar Selama Januari-April 2025," 2025. Accessed: Apr. 23, 2025. [Online]. Available: <https://berita.depok.go.id/polres-metro-depok-amankan-27-penjual-obat-daftar-g-tanpa-izin-edar-selama-januari-april-2025>
- [6] H. Hartanto and C. Wilda Meutia Syaifina, "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)," *J. Meta-Yuridis*, vol. 4, no. 1, pp. 54–72, 2021, doi: 10.26877/m-y.v4i1.6765.
- [7] D. E. Prabowo and D. Kurniawan, "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen," *J. Projudice*, vol. 2, no. 2, pp. 1–25, 2021.
- [8] B. Balai POM Bogor, "Rencana Strategis Balai POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2024," p. 6, 2021.
- [9] Z. Suriono, "Analisis SWOT dalam Identifikasi Mutu Pendidikan," *ALACRITY J. Educ.*, vol. 1, no. 20, pp. 94–103, 2022, doi: 10.52121/alacrity.v1i3.50.
- [10] M. A. Putri, A. Rahayu, and P. D. Dirgantari, "Analisis strategi pemasaran menggunakan matriks SWOT, matriks IFE, matriks EFE, dan matriks IE (Studi kasus pada bisnis Banjajagim.id)," *J. Manaj. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 7, no. 1, pp. 224–234, 2023, doi: 10.24912/jmbk.v7i1.20703.
- [11] P. Baliuskas, J. Llopis, J. Gasco, and R. Gonzalez, "Implementing turnaround strategies as an entrepreneurial process," *Int. Entrep. Manag. J.*, vol. 19, no. 4, pp. 2037–2063, 2023, doi: 10.1007/s11365-022-00810-9.
- [12] A. Qanita, "Analisis Strategi Dengan Metode Swot Dan Qspm (Quantitative Strategic Planning Matrix): Studi Kasus Pada D'Gruz Caffè Di Kecamatan Bluto Sumenep," *Komitmen J. Ilm. Manaj.*, vol. 1, no. 2, pp. 11–24, 2020, doi: 10.15575/jim.v1i2.10309.
- [13] R. Z. Aulia and H. Ali, "Pengaruh Kekuatan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Inovasi terhadap Strategi Kinerja Perusahaan," *J. Greenation Sos. dan Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, 2025, doi: 10.38035/jgsp.v3i1.261.
- [14] N. P. Y. Kemalajari, I. P. H. S. Putra, and I. N. P. Suryawan, "Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak," *J. Huk. Sar.*, vol. 5, no. 1, pp. 310–321, 2023, [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS>

- [15] A. N. Azhar, "Analisis Peran penting Indonesia dalam kerja sama ekonomi politik maritim," *J. Polinter Kaji. Polit. dan Hub. Int.*, vol. 9, no. 2, pp. 29–45, 2024, doi: 10.52447/pol.v9i2.7376.
- [16] A. Fauzia Rahma, E. Wirjatmi, and E. Jubaedah, "Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung," *J. Media Adm. Terap.*, vol. 4, no. 1, pp. 38–63, 2023, doi: 10.31113/jmat.v4i1.84.
- [17] A. S. Pramudyasari, R. Wisudawanto, and S. N. R. Putri, "Peran Humas Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Melalui Instagram," *KOMUNITAS J. Ilmu Komun.*, vol. 10, no. 1, pp. 36–41, 2024.
- [18] H. Hermin, M. Machmud, and H. Hasan, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Bisnis PT Pos Indonesia," *KONSTELASI Konvergensi Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 208–216, 2023, doi: 10.24002/konstelasi.v3i1.7027.
- [19] S. A. Shabihah, M. Ryanindityo, and I. Nurkumalawati, "Peran E-Governance Sebagai Instrumen Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah di Indonesia," *J. Adm. Int. Dev.*, vol. 5, no. 1, pp. 45–54, 2025, [Online]. Available: <https://10.0.205.137/jaid.v5i1.731>
- [20] M. Hasna, "Digitalisasi Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Kota Banjarmasin: Tinjauan Analisis SWOT Dalam Strategi Pengembangan Sekolah Digital," *J. Pendidik. Mod.*, vol. 10, no. 1, pp. 32–42, 2024, doi: 10.37471/jpm.v10i1.1053.
- [21] Rika Yohana Sari, Rusdinal, and Anisah, "Analisis Swot Sebagai Alat Penting Dalam Proses Perencanaan Strategis Organisasi Non-Profit," *J. Niara*, vol. 17, no. 1, pp. 87–97, 2024, doi: 10.31849/niara.v17i1.19967.
- [22] I. D. Prabowo and S. Supardal, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta," *Soc. J. Inov. Pendidik. IPS*, vol. 4, no. 4, pp. 731–745, 2025, doi: 10.51878/social.v4i4.4514.
- [23] Reza Syahputra, "Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing," *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2020.
- [24] M. F. Ismayanti Yahya, Tuti Bahfiarti, "KOMUNIKASI ANTAR ETNIK DI TENGAH KEBERAGAMAN BUDAYA DI KOTA KENDARI," *Aleph*, vol. 87, no. 1,2, pp. 149–200, 2023, [Online]. Available: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEI%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- [25] S. H. Kunjayanti, "Proses Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Produksi Dan Peredaran Obat OTC Illegal," *J. JURISTIC*, vol. 4, no. 03, p. 290, 2023, doi: 10.56444/jrs.v4i03.4747.
- [26] A. C. Adi, N. Setiawaty, A. L. Anindya, and H. Rachmawati, "Formulasi dan Karakterisasi Sediaan Nanoemulsi Vitamin A," *Media Gizi Indones.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.204736/mgi.v14i1.1-13>
- [27] F. A. F. Wahyudi, "Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan," pp. 34–44, 2024.
- [28] E. Ernawaty, D. W. Murtiningsih, E. Triwidianto, G. Sanjaya, and M. K. Huda, "Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 120–135, 2023, doi: 10.14710/jphi.v5i1.120-135.

- [29] dan A. R. Hasan Madani, Agustinus, “Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,” *JSIMJurnal Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 5, no. 5, pp. 1–23, 2024.
- [30] L. Aristawidya and A. Zuhrotun, “REVIEW ARTICLE The effectiveness of food and drug monitoring performance in the working area of the Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan in Bandung Efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di ,” pp. 155–164, 2025.
- [31] E. D. Pramestyani, “Analisis Dan Pengembangan Strategi Dalam Meningkatkan Daya Saing HonestDocs Sebagai Perusahaan Startup Di Era Industry 4.0,” *J. Manaj. Kesehat. Yayasan RS.Dr. Soetomo*, vol. 9, no. 2, p. 232, 2023, doi: 10.29241/jmk.v9i2.1439.